

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2011. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju.
- _____ dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Amrizakar. 2020. *Tabir Kesaktian Akta Notaris*. Jakarta: Khalifah Mediatama.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Miriam dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kohar, A. 1983. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Lexy J, Molong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: PT. Bale Bandung Sumur Bandung.

- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. . 1993. *Hukum Perikatan : Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- _____. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. . 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1998. *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa
- Soesanto, R. 1978. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

JURNAL

- Agustining, Hernoko, A,Y, Nasution, B., dan Sunarni. 2022. *Pre Project Selling Pattern in Sale and Purchase of Housing and Perspective of Equitable Legal Cohesiveness. Croatian International Relations Review, 28(90), 23-35*. Diakses 3 Novembr 2022, dari Universitas Gadjah Mada Perpustakaan.
- Latumeten, Pieter Everhardus, Erni, Daly, dan Fransiska, Ling. 2021. Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2377K/PDT/2016). *Jurnal Indonesian Notary No. 2 Vol 3*.
- Hamonangan, Alusianto. 2021. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana No 2 Vol 4*.
- Nurwulan, Pandam. 2015. Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Rumah Susun/Apartemen di Daerah Istimewa Yogyakarta Kaitannya dengan Peran Notaris-PPAT. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No 4 Vol 22*.

Riza, Muhammad Amaludin. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Titipan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum No. 2 Vol 4*.

Susiolo, Haryanto, Romauli, Sibuea Mia Augina, dan Sulistyarini, Rachmi. 2021. Tanggungjawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparasi. *Jurnal Suara Hukum No. 1 Vol 4*.

Swerasoma, Cokorda Gede. 2021. Kesetaraan Pasa Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada Tanah dan Bangunan dalam Pre Project Selling System. *Padjadjaran Journal of Law No 3 Vol. 8*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 108. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No 134. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lembaran Negara RI No. 22. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Menteri Negara Perumahan Rakyat Bab III mengenai Aspek-Aspek Hukum Dalam Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor . Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 Tentang Izin Membangun Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.